



## ANALISIS KETERKAITAN SEKTOR PERTANIAN, INDUSTRI DAN JASA DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH DI RIAU

Azzahwa Alyani Putri<sup>1</sup>, Hilda Aulia<sup>2</sup>, Isyandi<sup>3</sup>, Ufira Isbah<sup>4</sup>, Dahlan Tampubolon<sup>5</sup>  
1,2,3,4,5 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas  
Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [azzahwa.alayani3200@student.unri.ac.id](mailto:azzahwa.alayani3200@student.unri.ac.id),

**Abstract.** Sustainable regional development requires strong intersectoral linkages, particularly among the agricultural, industrial, and service sectors, which play interconnected roles in driving economic growth. Riau Province, as a resource-based region, faces challenges in achieving a balanced and competitive economic structure. This study aims to analyze the interlinkages among the agricultural, industrial, and service sectors in regional development in Riau Province during the period 2021–2025. The research employs a quantitative descriptive approach using Location Quotient (LQ), Shift Share, Klassen Typology, and Input-Output (I-O) analysis based on Gross Regional Domestic Product (GRDP) data. The results indicate that agriculture, mining, and manufacturing are base sectors, with the manufacturing sector demonstrating the highest level of competitiveness. Based on Klassen Typology, the agricultural sector is classified as advanced and fast-growing, while the industrial and mining sectors are categorized as advanced but under pressure. Most service sectors are identified as potential sectors, whereas transportation and accommodation remain relatively lagging. Furthermore, the Input-Output analysis reveals that the manufacturing sector and electricity and gas supply are key sectors with strong backward and forward linkages, generating significant multiplier effects in the regional economy. Policy implications highlight the importance of agricultural downstreaming, strengthening industrial competitiveness, improving infrastructure and regional connectivity, and enhancing intersectoral integration to achieve balanced and sustainable regional development.

**Keywords:** Location Quotient; Regional Development; Agricultural Sector; Industry Sector; Service Sector; Shift Share; Input-Output Analysis; Klassen Typology

**Abstrak.** Pembangunan daerah yang berkelanjutan membutuhkan kerjasama antar sektor ekonomi, terutama sektor pertanian, industri, dan jasa yang saling berhubungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Provinsi Riau, yang sebagian besar bergantung pada sektor sumber daya alam, menghadapi masalah dalam menciptakan struktur ekonomi yang seimbang dan kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara sektor pertanian, industri, dan jasa dalam pembangunan daerah di Provinsi Riau periode 2021–2025. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis Location Quotient (LQ), Shift Share, Tipologi Klassen, dan Input-Output (I-O) menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan adalah sektor utama, dengan sektor industri pengolahan memiliki daya saing tertinggi. Berdasarkan Tipologi Klassen, sektor pertanian masuk dalam kategori maju dan berkembang cepat, sementara sektor industri dan pertambangan dianggap maju tetapi mengalami tekanan pertumbuhan. Sebagian besar sektor jasa masuk dalam kategori memiliki potensi untuk berkembang, sedangkan sektor transportasi dan akomodasi masih tertinggal. Analisis Input-Output menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan serta penyediaan listrik dan gas adalah sektor kunci dengan hubungan ke belakang dan ke depan yang kuat, sehingga memberikan dampak besar terhadap ekonomi lokal. Implikasi kebijakan menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian, penguatan daya saing industri, peningkatan infrastruktur dan konektivitas daerah, serta integrasi antar sektor untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Location Quotient; Pembangunan Wilayah; Sektor Pertanian; Sektor Industri; Sektor Jasa; Shift Share; Analisis Input-Output; Tipologi Klassen

## 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan yang terencana serta serangkaian tindakan yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan bertahap, yang semuanya bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan daerah tercermin dari keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat bekerja sama dalam proses pembangunan ekonomi daerah untuk mengelola sumber daya yang tersedia dan menjalin kemitraan guna menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Kemajuan ekonomi, penyempitan kesenjangan pendapatan di antara penduduk, antardaerah, dan lintas sektor merupakan indikator keberhasilan pembangunan (Suryani, 2013).

Perluasan industri-industri lain didorong oleh potensi pertumbuhan yang signifikan pada industri-industri unggulan (Robinson Tarigan, 2018). Dengan menciptakan kebijakan prioritas untuk pengembangan sektor-sektor atau komoditas unggulan ini, industri atau produk unggulan suatu wilayah harus dikembangkan guna memfasilitasi pertumbuhan ekonomi regional yang cepat. Kegiatan dasar suatu wilayah, yaitu kegiatan yang memprioritaskan ekspor barang dan jasa dengan keunggulan komparatif ke lokasi di luar wilayah tersebut, berkontribusi pada kapasitas pertumbuhan dan pembangunannya. Hal ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2008).

Karena kontribusinya yang sangat penting dan fungsinya, terutama dalam penyediaan pangan dan bahan baku industri, menghasilkan devisa, menciptakan peluang kerja, serta membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, sektor pertanian sangat penting bagi pembangunan suatu negara atau wilayah. Selain itu, sektor pertanian juga sangat penting bagi perekonomian daerah karena menyediakan bahan baku, meningkatkan pendapatan per kapita, dan membantu penyerapan tenaga kerja, yang semuanya mendorong perkembangan ekonomi daerah (Hayati et al., 2017).

Selain itu, sektor industri harus mendukung pertumbuhan industri pertanian yang kuat dan tangguh. Industri pertanian, yang sering disebut sebagai agroindustri, sangat penting bagi perekonomian negara karena meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan berfungsi sebagai sumber devisa utama. Peran sektor pertanian tidak hanya dilihat dari produk primer yang dihasilkan, tetapi juga harus dikaitkan dengan industri pengolahan dan pemasaran yang telah diciptakan serta perannya dalam mendorong pembangunan wilayah. Sektor pertanian memiliki keterkaitan erat dengan industri pengolahan. Sektor pertanian berperan sebagai pemasok bahan baku bagi kegiatan industri pengolahan (Oktaliando et al., 2013).

Lebih lanjut, keterkaitan ini semakin lengkap dengan dukungan sektor jasa yang berperan sebagai pendukung rantai nilai secara keseluruhan. Sektor jasa, seperti perdagangan, transportasi, logistik, dan pariwisata agro, tidak hanya memfasilitasi distribusi dan pemasaran hasil pertanian serta agroindustri ke pasar domestik maupun ekspor, tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi wilayah melalui penyediaan layanan pendukung seperti keuangan, informasi pasar, dan pelatihan sumber daya manusia. Pengembangan sektor jasa yang terintegrasi dengan pertanian dapat mempercepat multiplier effect, di mana aktivitas jasa merangsang permintaan input dari sektor primer dan sekunder, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan serta pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, sinergi ketiga sektor ini pertanian, agroindustri, dan jasa menjadi kunci utama dalam menciptakan basis ekonomi wilayah yang kompetitif dan inklusif (Barika et al., 2021).

Struktur perekonomian wilayah pada dasarnya diwujudkan dalam pengelompokan sektor-sektor ekonomi berdasarkan lapangan usaha. Secara umum, perekonomian dibagi menjadi tujuh belas sektor, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: sektor primer (pertanian, pertambangan, dan penggalian), sektor sekunder (manufaktur, listrik, gas, penyediaan air, dan konstruksi), serta sektor tersier (jasa). Pengelompokan ini menekankan saling ketergantungan dan keterkaitan antarindustri dalam mendorong pertumbuhan perekonomian regional.

**Tabel 1. Struktur Sektor Ekonomi Pada Data PDRB**

Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tersier
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya

*Sumber: BPS Riau (2025), data diolah*

Pengelompokan sektor-sektor tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan saling ketergantungan antar sektor dalam perekonomian wilayah. Sektor primer menyediakan input bagi sektor sekunder, yang kemudian hasilnya didistribusikan dan didukung oleh sektor tersier. Oleh karena itu, keseimbangan dan sinergi antar ketiga sektor ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

Pertumbuhan produk domestik bruto regional (PDBR) pada harga konstan dapat digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi yang sebenarnya. Di Provinsi Riau, perkembangan ekonomi ditandai oleh pertumbuhan ekonomi riil yang positif (sebagaimana ditentukan oleh PDBR pada harga konstan), sedangkan pertumbuhan negatif menandakan perlambatan ekonomi.

**Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau 2016-2025**

Tahun	Nilai ADHK (persen)
2016	2,18%
2017	2,66%
2018	2,35%
2019	2,81%
2020	-1,13%
2021	3,36%
2022	4,55%
2023	4,21%
2024	3,52%
2025	4,79%

Sumber: BPS Riau (2025), data diolah

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, dapat diketahui bahwa ekonomi daerah mengalami perubahan yang berfluktuasi tetapi menunjukkan arah yang positif dalam jangka panjang. Pada tahun 2020 terjadi penyusutan ekonomi sebesar -1,13 persen akibat dampak pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2021, ekonomi Provinsi Riau mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan terus meningkat hingga mencapai 4,79 persen pada tahun 2025, mencerminkan kemampuan ekonomi daerah dalam beradaptasi serta prospek yang baik bagi pembangunan ekonomi di masa mendatang.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### 2.1 Konsep Pembangunan Wilayah

Todaro & Smith, (2009), mendefinisikan pembangunan sebagai proses multidimensi yang mencakup reformasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan menekankan bahwa pembangunan merupakan perluasan kebebasan manusia untuk memilih dan mewujudkan potensinya, Sen (1999) mengembangkan definisi tersebut. Sebagai indikator keberhasilan pembangunan di era modern, pembangunan Indonesia telah bergeser dari fokus pada ekspansi makroekonomi menuju kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan (Situmeang, 2023).

Menurut Sjafrizal, (2008) suatu wilayah adalah satuan geografis dengan batas-batas administratif dan fungsional tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi. Di Indonesia, kondisi geografis yang luas menyebabkan setiap wilayah memiliki struktur ekonomi yang berbeda: Jawa lebih industri dan jasa, sedangkan luar Jawa masih dominan pada pertanian dan sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, seperti Jawa. Sehingga kesenjangan antardaerah menjadi masalah yang signifikan dalam pembangunan nasional (Azizah & Widiyanto, 2025).

Teori pertumbuhan yang tidak seimbang pertama kali dikemukakan oleh Hirschman (1958) dan Myrdal (1957). Menurut Hirschman, pembangunan dimulai dari industri atau

wilayah yang menonjol, yang kemudian menyebar ke sektor-sektor lain. Sebaliknya, Myrdal memperingatkan terhadap efek backwash, di mana daerah-daerah yang makmur menarik sumber daya dari daerah-daerah yang kurang makmur. Akibatnya, konsep pembangunan antardaerah yang seimbang menuntut langkah-langkah kebijakan yang dapat meningkatkan konektivitas dan menjamin bahwa manfaat pembangunan ekonomi didistribusikan secara adil.

Secara historis, strategi pembangunan Indonesia bersifat top-down dan sektoral yang berfokus pada pemerintah pusat. Strategi ini berfokus pada prioritas pembangunan ekonomi tertentu, seperti industri, pertanian, atau infrastruktur, dengan harapan hal tersebut akan memberikan manfaat bagi daerah-daerah (efek trickle-down). Namun demikian, karena tidak adanya partisipasi daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan, Asriadi et al., (2024) menyatakan bahwa model sektoral semacam itu tidak mampu mengatasi ketimpangan. Pendekatan sektoral sering kali gagal mempertimbangkan keunikan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat dalam praktiknya, yang menyebabkan inefisiensi pembangunan dan daya saing daerah yang rendah.

Akibat kelemahan-kelemahan tersebut, muncullah strategi pembangunan daerah yang menekankan pada keterkaitan spasial serta pentingnya daerah sebagai unit ekonomi yang saling bergantung. Menurut pandangan ini, pembangunan merupakan interaksi menyeluruh antara sektor dan lokasi. Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional, pembangunan daerah di Indonesia difokuskan pada peningkatan koridor ekonomi dan keterkaitan antardaerah (Ansofino, 2016). Oleh karena itu, pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada ekspansi ekonomi di pusat-pusat industri, tetapi juga pada pembinaan hubungan fungsional antara pusat-pusat tersebut dengan daerah-daerah di sekitarnya.

## **2.2 Teori Ekonomi Basis (Base Theory)**

Menurut teori ekonomi basis, faktor utama yang memengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah adalah permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah tersebut. Pengembangan industri yang memanfaatkan sumber daya lokal, seperti tenaga kerja dan bahan baku, untuk ekspor akan menghasilkan kemakmuran daerah dan penciptaan lapangan kerja (Arsyad, 2010).

Menurut Robinson Tarigan, (2018) berdasarkan teori basis ekonomi, perkonomian suatu wilayah dibagi menjadi dua, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke luar batas-batas perkonomian wilayah yang bersangkutan. Sementara itu, sektor non-basis terdiri dari usaha-usaha yang menyediakan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggal di dalam batas-batas ekonomi regional tersebut.

Pendekatan Location Quotient (LQ), yang membandingkan pangsa relatif pendapatan sektor *i* (tenaga kerja) di tingkat regional terhadap total pendapatan wilayah tersebut dengan pangsa relatif pendapatan sektor *i* di tingkat nasional terhadap total pendapatan nasional, adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu sektor atau subsektor ekonomi termasuk dalam kategori dasar atau non-dasar. Dalam perekonomian regional yang bersangkutan, suatu sektor ekonomi dianggap sebagai sektor basis jika nilai LQ-nya lebih besar dari atau sama dengan satu, tetapi dianggap sebagai sektor non-basis jika nilai LQ-nya kurang dari satu (Tutupoho, 2019).

Logika dasar model LQ menurut Tutupoho, (2019) adalah sebuah teori ekonomi yang menyatakan bahwa penjualan suatu wilayah ke wilayah lain akan menghasilkan pendapatan bagi wilayah tersebut, karena industri dasar menghasilkan barang dan jasa untuk pasar baik di dalam maupun di luar wilayah tersebut. Selain itu, konsumsi (C) dan investasi (I) wilayah tersebut meningkat sebagai akibat dari masuknya dana dari luar wilayah tersebut. Akibatnya,

akan ada lebih banyak peluang kerja dan penghasilan yang lebih tinggi. Peningkatan pendapatan ini meningkatkan permintaan baik terhadap industri dasar maupun industri non-dasar (lokal). Sebagai akibat dari peningkatan permintaan ini, akan ada lebih banyak investasi pada industri yang bersangkutan serta pada sektor-sektor lainnya.

Sebuah sektor dianggap sebagai sektor dasar jika nilai LQ (industri) nya 1 atau lebih. Sebaliknya, jika nilai LQ suatu sektor (industri) kurang dari 1, sektor tersebut dianggap sebagai sektor non-inti. Premis model LQ adalah bahwa penduduk wilayah tersebut memiliki pola permintaan regional yang sama dengan pola permintaan nasional. Hipotesis tambahan adalah bahwa produksi lokal pada awalnya akan memenuhi permintaan regional untuk suatu barang tertentu, dengan kekurangan apa pun dipenuhi oleh impor dari daerah lain.

### **2.3 Teori Keterkaitan Antar Sektor (*Intersectoral Linkages*)**

Keterkaitan antar sektor merupakan hubungan saling ketergantungan antara satu sektor ekonomi dengan sektor lainnya dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Hubungan ini menunjukkan bahwa perkembangan suatu sektor akan memengaruhi sektor lain secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pembangunan ekonomi regional, analisis keterkaitan sektor sangat penting untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif.

Menurut Wassily Leontief, perekonomian terdiri atas sektor-sektor yang saling terhubung melalui aliran input dan output. Output dari suatu sektor akan menjadi input bagi sektor lainnya, sehingga menciptakan suatu sistem ekonomi yang terintegrasi. Model ini dikenal sebagai Analisis Input-Output (I-O), yang digunakan untuk mengukur struktur ekonomi dan dampak perubahan suatu sektor terhadap sektor lainnya.

Model Input-Output (I-O) menawarkan dua metode utama untuk menganalisis secara sistematis saling ketergantungan atau hubungan antara satu sektor ekonomi dengan sektor-sektor lain dalam proses produksi: hubungan ke depan dan hubungan ke belakang. Kedua jenis hubungan ini sangat penting untuk menunjukkan sejauh mana suatu sektor berkontribusi terhadap atau bergantung pada sektor-sektor lain dalam struktur ekonomi. Hal ini menjadikan keduanya sangat berguna untuk perencanaan pembangunan dan penentuan sektor-sektor prioritas.

Tingkat ketergantungan suatu sektor terhadap input dari sektor lain untuk memenuhi permintaan akhir dikenal sebagai hubungan ke belakang. Dengan kata lain, studi ini menunjukkan seberapa besar peningkatan permintaan akhir pada sektor tertentu akan menyebabkan peningkatan output dari sektor tersebut serta dari industri lain yang mendukung kebutuhan produksinya. Akibatnya, hubungan ke belakang sering dikaitkan dengan konsep pengganda output, karena hubungan ini menggambarkan efek pengganda ekonomi dari meningkatnya permintaan terhadap suatu industri terhadap pemasok hulu (Huda et al., 2025).

Selain itu, kontribusi suatu sektor dalam penyediaan input atau bahan baku bagi sektor-sektor di hilir rantai nilai dijelaskan melalui hubungan ke depan. Dengan kata lain, hubungan ke depan menunjukkan seberapa besar output suatu industri tertentu dibutuhkan oleh industri lain untuk melanjutkan kegiatan produksinya, terutama sebagai respons terhadap fluktuasi permintaan akhir dari sektor-sektor hilir. Memahami fungsi strategis suatu sektor dalam mendukung kegiatan produktif sektor-sektor lain di sepanjang rantai nilai ekonomi yang lebih luas sangatlah penting, sebagaimana ditekankan oleh (Huda et al., 2025).

Matriks invers Leontief, yang ditentukan oleh struktur koefisien input dalam tabel Input-Output, digunakan untuk menentukan besarnya hubungan-hubungan ini. Komponen-

komponen matriks invers Leontief dijumlahkan berdasarkan kolom (penjumlahan vertikal) untuk menentukan hubungan ke belakang, karena kolom mencerminkan input yang dibutuhkan oleh suatu industri tertentu dari industri lain. Sedangkan untuk menghitung keterkaitan ke depan, dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen dalam matriks tersebut menurut baris (horizontal summation), karena baris menunjukkan seberapa besar output suatu sektor digunakan oleh sektor lain sebagai input dalam proses produksinya (Huda et al., 2025).

As a result, these two kinds of interrelationships offer a complete view of each sector's position in the economic framework, both as a user and a supplier of inter-sectoral inputs, which may be used as the foundation for policymaking in the planning of priority sectors and the maximization of regional economic potential.

#### **2.4 Metode Analisis Sektoral**

Metode analisis sektoral yang dipakai dalam studi ini mencakup tiga pendekatan utama. Pertama, Location Quotient (LQ) untuk menemukan sektor basis dan non-basis. Jika nilai LQ suatu sektor lebih dari satu ( $LQ > 1$ ), maka sektor itu dianggap sebagai sektor basis (Sjafrizal, 2008). Kedua, Analisis Shift Share yang membagi pertumbuhan sektor menjadi tiga bagian: pertumbuhan nasional (national share), bauran industri (industry mix), dan keunggulan kompetitif wilayah (regional shift). Ketiga, Analisis Tipologi Klassen yang mengelompokkan sektor menjadi empat kuadran berdasar pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB. Keempat, Analisis Input-Output (I-O) digunakan untuk mengetahui keterkaitan antar sektor ekonomi berdasarkan model Leontief. Analisis ini mengukur keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan keterkaitan ke depan (forward linkage) yang didapat dari matriks kebalikan Leontief  $(I-A)^{-1}$ . Nilai keterkaitan yang lebih besar dari satu ( $\geq 1$ ) menunjukkan sektor yang memiliki peran penting dalam ekonomi. Selanjutnya, sektor dikelompokkan menjadi sektor kunci, berbasis permintaan akhir, berbasis penawaran, dan sektor lemah berdasar nilai keterkaitan tersebut (Arsyad, 2010).

### **3. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif deskriptif sebagai metode utama, dengan menganalisis data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau berdasarkan harga berlaku dan harga konstan periode 2021–2025, serta data PDB Nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Empat metode analisis sektoral diterapkan secara berurutan: (1) Analisis Location Quotient (LQ) dengan rumus  $LQ = (PDRB_{ir}/TPDRB_r) / (PDRB_{in}/TPDRB_n)$ , di mana sektor basis ditunjukkan oleh  $LQ \geq 1$ ; (2) Analisis Shift Share dengan memecah perubahan PDRB sektor ke dalam komponen Regional Share (RS), Proportional Share (PS), dan Differential Share (DS), yaitu  $\Delta Y_i = RS + PS + DS$ ; (3) Analisis Tipologi Klassen yang mengelompokkan sektor berdasarkan perbandingan pertumbuhan sektor ( $g_i$  vs  $g$ ) dan kontribusi sektor ( $s_i$  vs  $s$ ) menjadi empat kuadran. Seluruh data diolah menggunakan Microsoft Excel; (4) Analisis Input-Output yang digunakan untuk menilai hubungan antar sektor melalui indikator backward linkage dan forward linkage yang diperoleh dari matriks invers Leontief  $(I-A)^{-1}$ , dimana sektor dengan nilai keterkaitan  $\geq 1$  dikategorikan sebagai sektor kunci. Seluruh data diolah menggunakan Microsoft Excel.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Struktur Perekonomian Provinsi Riau**

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat dinilai melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Provinsi Riau termasuk kedalam daerah dengan struktur ekonomi

yang kuat dan penting di Indonesia, terutama karena didukung oleh potensi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan perkebunan kelapa sawit. Nilai PDRB meningkat secara terus-menerus dari Rp839. 002. 413 juta pada tahun 2021 menjadi Rp1. 201. 383. 763 juta pada tahun 2025.

**Tabel 2. PDRB Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku 2021-2025(dalam juta rupiah)**

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	225.489.330	253.079.268	282.789.051	301.625.900	338.699.892
Pertambangan dan Penggalian	165.084.235	225.118.957	203.007.677	205.758.437	193.370.540
Industri Pengolahan	235.379.363	270.307.268	282.789.051	312.817.742	358.361.545
Pengadaan Listrik dan Gas	655.954	776.407	830.003	888.428	935.913
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah	88.364	93.720	102.468	108.827	119.532
Konstruksi	75.516.708	84.970.044	99.415.700	106.657.204	113.233.815
Perdagangan Besar dan Eceran	82.995.895	97.084.953	105.304.319	114.288.248	121.825.108
Transportasi dan Pergudangan	5.670.420	7.343.715	8.544.099	9.502.723	9.918.529
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3.978.255	4.521.221	4.823.513	5.495.387	5.818.808
Informasi dan Komunikasi	6.915.269	7.530.837	8.192.722	8.836.766	9.350.869
Jasa Keuangan dan Asuransi	7.954.981	9.144.236	9.688.445	9.924.391	10.610.063
Real Estat	7.321.896	7.992.862	8.531.360	9.027.069	9.490.802
Jasa Perusahaan	36.548	42.818	47.184	51.489	57.837

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
Administrasi Pemerintahan	11.562.577	12.379.506	13.223.706	14.528.922	15.189.490
Jasa Pendidikan	4.585.176	4.832.172	5.077.050	5.401.861	5.967.727
Jasa Kesehatan	2.188.003	2.287.700	2.514.015	2.713.601	3.006.146
Jasa Lainnya	3.579.440	4.109.698	4.438.684	4.854.620	5.427.149
<b>PDRB</b>	<b>839.002.413</b>	<b>991.615.380</b>	<b>1.026.468.040</b>	<b>1.112.481.615</b>	<b>1.201.383.763</b>

Sumber: BPS Riau (2025), data diolah

Dari sisi sektoral, struktur ekonomi Provinsi Riau ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertanian, serta pertambangan dan penggalian. Sektor industri pengolahan adalah penyumbang terbesar untuk PDRB, dengan nilai yang naik dari Rp235. 379. 363 juta pada tahun 2021 menjadi Rp358. 361. 545 juta pada tahun 2025. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memberikan kontribusi yang banyak dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari Rp225. 489. 330 juta menjadi Rp338. 699. 892 juta. Nilai PDRB tanpa migas meningkat dari Rp702. 392. 472 juta menjadi Rp1. 043. 575. 785 juta, menunjukkan semakin kuatnya peran sektor nonmigas dalam mendukung ekonomi daerah.

#### 4.2 Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis LQ dihitung dengan membandingkan fungsi suatu bidang usaha di Riau dibandingkan dengan bidang usaha yang sama di tingkat nasional. Dari perhitungan LQ PDRB dalam periode 2021–2025, terlihat bahwa ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor-sektor tertentu dengan variasi tingkat spesialisasi yang berbeda..

**Tabel 3. Analisis Location Quotient Provinsi Riau, 2021-2025**

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata	Ket
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,200	2,228	2,289	2,358	2,356	2,286	BASIS
Pertambangan dan Penggalian	2,075	2,029	1,976	1,918	1,939	1,988	BASIS
Industri Pengolahan	1,561	1,570	1,567	1,579	1,601	1,576	BASIS
Pengadaan Listrik dan Gas	0,074	0,080	0,078	0,080	0,082	0,079	NON BASIS
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah	0,156	0,159	0,161	0,167	0,177	0,164	NON BASIS
Konstruksi	0,849	0,878	0,921	0,930	0,944	0,904	NON BASIS

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata	Ket
Perdagangan Besar dan Eceran	0,710	0,758	0,773	0,793	0,794	0,765	NON BASIS
Transportasi dan Pergudangan	0,181	0,180	0,173	0,172	0,164	0,174	NON BASIS
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,153	0,152	0,146	0,151	0,146	0,150	NON BASIS
Informasi dan Komunikasi	0,180	0,180	0,181	0,184	0,180	0,181	NON BASIS
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,238	0,246	0,247	0,242	0,244	0,243	NON BASIS
Real Estat	0,319	0,333	0,344	0,354	0,356	0,341	NON BASIS
Jasa Perusahaan	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	NON BASIS
Administrasi Pemerintahan	0,505	0,526	0,550	0,574	0,581	0,547	NON BASIS
Jasa Pendidikan	0,167	0,174	0,179	0,183	0,190	0,179	NON BASIS
Jasa Kesehatan	0,184	0,185	0,191	0,191	0,197	0,190	NON BASIS
Jasa Lainnya	0,242	0,252	0,244	0,243	0,247	0,246	NON BASIS

Sumber: BPS Riau (2025), data diolah

Berdasarkan rata-rata perhitungan LQ pada tahun 2021 hingga 2025, sektor pertanian, kehutanan, perikanan (LQ=2,286), pertambangan dan penggalian (LQ=1,988), dan industri pengolahan (LQ=1,576) diidentifikasi sebagai sektor dasar. Ini menunjukkan bahwa ekonomi daerah masih banyak dipengaruhi oleh sektor primer serta beberapa sektor sekunder. Di sisi lain, sebagian besar sektor lainnya terutama sektor jasa dianggap sebagai sektor non dasar, menandakan bahwa sektor tersier belum mencapai tingkat spesialisasi yang kuat.

#### 4.3 Analisis Shift Share

Analisis Shift Share digunakan untuk mengkaji perbedaan laju pertumbuhan antar sektor ekonomi di Provinsi Riau dengan area nasional. Komponen Regional Share (RS) menunjukkan pertumbuhan sektor yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan, Proportional Share (PS) menunjukkan pengaruh struktur sektoral nasional,

sementara Differential Share (DS) menggambarkan keunggulan daya saing sektor di wilayah regional dibandingkan nasional.

**Tabel 4. Analisis Shift Share Provinsi Riau 2021-2025**

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian (Sektor Primer)	3.090,54	5.029,58	6.656,21	3.627,12	7.577,49
Industri (Sektor Sekunder)	7.520,28	9.767,88	10.280,6	9.781,04	14.330,9
Jasa (Sektor Tersier)	5.865,33	8.263,62	5.358,67	5.996,94	5.468,48

Sumber: BPS Riau (2025), data diolah

Berdasarkan analisis Shift Share Provinsi Riau antara tahun 2021 hingga 2025, terlihat bahwa sektor sekunder (industri) menunjukkan kontribusi shift share terbesar dibandingkan sektor-sektor yang lain. Sektor industri tumbuh dari 7. 520,28 pada tahun 2021 dan meloncat tajam pada tahun 2025 dengan angka 14. 330,9. Sektor primer (pertanian) menunjukkan tren yang berfluktuasi tetapi dengan kecenderungan meningkat, mencapai 7. 577,49 pada tahun 2025. Sedangkan sektor tersier (jasa) menunjukkan pola pertumbuhan yang lebih tidak stabil dengan nilai tertinggi 8. 263,62 pada tahun 2022.

#### 4.4 Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen mengelompokkan sektor-sektor ekonomi dalam empat kuadran berdasarkan perbandingan laju pertumbuhan ( $gi$  vs  $g$ ) dan kontribusi ( $si$  vs  $s$ ) tiap sektor terhadap PDRB.

**Tabel 5. Tipologi Klassen Sektoral Provinsi Riau 2021-2025**

<p><b>Kuadran I – Sektor Maju dan Tumbuh Cepat</b> (<math>gi &gt; g</math> dan <math>si &gt; s</math>)</p> <p>A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</p>	<p><b>Kuadran II – Sektor Maju Tertekan</b> (<math>gi &lt; g</math> dan <math>si &gt; s</math>)</p> <p>B. Pertambangan dan Penggalian</p> <p>C. Industri Pengolahan</p>
<p><b>Kuadran III – Sektor Potensial/Berkembang Cepat</b> (<math>gi &gt; g</math> dan <math>si &lt; s</math>)</p> <p>D, E, F, G, J, K, L, M,N, O, P, Q, R,S,T,U</p> <p>(Pengadaan Listrik, Pengadaan Air, Konstruksi, Perdagangan, Informasi, Jasa Keuangan, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, Jasa Lainnya)</p>	<p><b>Kuadran IV – Sektor Relatif Tertinggal</b> (<math>gi &lt; g</math> dan <math>si &lt; s</math>)</p> <p>H. Transportasi dan Pergudangan</p> <p>I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</p>

Sumber: BPS Riau (2025), data diolah

Hasil analisis menunjukkan sektor pertanian berada di Kuadran I (sektor yang maju dan tumbuh cepat), menandakan sektor ini memiliki daya saing tinggi dan menjadi pendorong utama ekonomi. Sektor pertambangan dan industri pengolahan di Kuadran II menunjukkan kontribusi besar tetapi pertumbuhan yang lambat, sehingga perlu revitalisasi dan peningkatan

produktivitas. Kebanyakan sektor jasa di Kuadran III menunjukkan potensi besar untuk berkembang jika didukung kebijakan yang tepat. Sementara sektor transportasi dan akomodasi di Kuadran IV memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

#### 4.5 Analisis Input-Output (IO)

**Tabel 6 . Hasil Analisis Input-Output (IO)**

No.	Kode	Sektor	Backward Linkage (BL)		Forward Linkage (FL)		Klasifikasi Sektor
			Indeks BL	BL Normalisasi	Indeks FL	FL Normalisasi	
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.1318	0.8084	1.9499	1.3927	Berbasis Penawaran (Supply-Oriented)
2	B	Pertambangan dan Penggalian	1.1664	0.8331	1.5036	1.0740	Berbasis Penawaran (Supply-Oriented)
3	C	Industri Pengolahan	1.6934	1.2095	2.6947	1.9247	Sektor Kunci (Key Sector)
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.0350	1.4535	2.0211	1.4436	Sektor Kunci (Key Sector)
5	E	Pengadaan Air, Sampah, Limbah	1.4760	1.0542	1.0225	0.7303	Berbasis Permintaan Akhir (Demand-Oriented)
6	F	Konstruksi	1.5119	1.0799	1.3619	0.9727	Berbasis Permintaan Akhir (Demand-Oriented)
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran	1.2440	0.8886	1.5136	1.0811	Berbasis Penawaran (Supply-Oriented)

No.	Kode	Sektor	Backward Linkage (BL)		Forward Linkage (FL)		Klasifikasi Sektor
			Indeks BL	BL Normalisasi	Indeks FL	FL Normalisasi	
8	H	Transportasi dan Pergudangan	1.5711	1.1222	1.2645	0.9032	Berbasis Permintaan Akhir (Demand-Oriented)
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.4973	1.0695	1.1187	0.7991	Berbasis Permintaan Akhir (Demand-Oriented)
10	J	Informasi dan Komunikasi	1.2231	0.8736	1.3784	0.9845	Sektor Lemah (Weak Sector)
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.1586	0.8275	1.2068	0.8620	Sektor Lemah (Weak Sector)
12	L	Real Estate	1.2015	0.8582	1.0967	0.7833	Sektor Lemah (Weak Sector)
13	MN	Jasa Perusahaan	1.3561	0.9686	1.4181	1.0129	Berbasis Penawaran (Supply-Oriented)
14	O	Administrasi Pemerintahan	1.4045	1.0032	1.0939	0.7813	Berbasis Permintaan Akhir (Demand-Oriented)
15	P	Jasa Pendidikan	1.2947	0.9248	1.0265	0.7332	Sektor Lemah (Weak Sector)
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.5249	1.0892	1.0395	0.7425	Berbasis Permintaan Akhir (Demand-Oriented)

No.	Kode	Sektor	Backward Linkage (BL)		Forward Linkage (FL)		Klasifikasi Sektor
			Indeks BL	BL Normalisasi	Indeks FL	FL Normalisasi	
17	RSTU	Jasa Lainnya	1.3104	0.9360	1.0903	0.7788	Sektor Lemah (Weak Sector)
Rata-rata			1,4000	1,0000	1,4000	1,0000	

Sumber: Hasil Olah Data, (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2021)

### ***Keterkaitan ke Belakang (Backward Linkage)***

Keterkaitan ke belakang (backward linkage) menilai kapasitas suatu sektor untuk menggunakan output dari sektor lain sebagai input produksinya. Indeks ini dihitung dari total kolom matriks Kebalikan Leontief  $(I-A)^{-1}$  yang dinormalisasi terhadap rata-rata semua sektor. Nilai BL normalisasi  $\geq 1$  menunjukkan bahwa sektor tersebut mempunyai kemampuan distribusi di atas rata-rata ekonomi (Miller & Blair, 2009).

Berdasarkan Tabel 6, sektor Pengadaan Listrik dan Gas (D) memiliki indeks backward linkage tertinggi sebesar 2,0350 dengan BL normalisasi 1,4535. Ini berarti setiap peningkatan permintaan akhir Rp1 di sektor ini mendorong total output ekonomi Riau sebesar Rp2,0350. Posisi berikutnya ditempati Industri Pengolahan (C) dengan indeks BL 1,6934, Jasa Kesehatan (Q) sebesar 1,5249, dan Konstruksi (F) sebesar 1,5119. Menurut Ronalia (2021), Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik dan Gas adalah sektor unggulan Riau dengan kemampuan menarik pertumbuhan sektor-sektor pemasok.

Sektor-sektor dengan BL normalisasi  $\geq 1$  berjumlah 9 sektor, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas (D), Industri Pengolahan (C), Jasa Kesehatan (Q), Konstruksi (F), Transportasi dan Pergudangan (H), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I), Pengadaan Air/Sampah/Limbah (E), Administrasi Pemerintahan (O), dan Pertambangan dan Pengalihan (B). Alhempy et al., (2014) menemukan bahwa sektor pertambangan dan pertanian secara konsisten menjadi sektor dasar, yang mengonfirmasi tingginya daya serap sektor-sektor sumber daya alam Riau terhadap input ekonomi regional.

### ***Keterkaitan ke Depan (Forward Linkage)***

Keterkaitan ke depan (forward linkage) menunjukkan kemampuan suatu sektor untuk menyediakan outputnya sebagai input untuk sektor-sektor lain. Nilai FL normalisasi  $\geq 1$  menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki sensitivity of dispersion yang tinggi, artinya sektor tersebut berfungsi penting sebagai pemasok input dalam rantai produksi wilayah. Miller & Blair (2009) menekankan bahwa sektor dengan FL tinggi adalah sektor yang peningkatan outputnya akan mendorong pertumbuhan di banyak sektor hilir secara bersamaan.

Dari hasil analisis diperoleh bahwa sektor Industri Pengolahan (C) memiliki nilai forward linkage tertinggi dengan indeks FL 2,6947 (FL normalisasi 1,9247). Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (D) berada di posisi kedua dengan FL 2,0211, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) sebesar 1,9499. Ronalia, (2021) mengonfirmasi temuan ini: sektor Industri Pengolahan Riau sangat berkaitan dengan sektor pertanian (terutama kelapa sawit) sebagai

pemasok bahan baku, sehingga hilirisasi industri menjadi strategi tepat untuk memperkuat rantai nilai wilayah. Rahmawan & Angraini (2021) menemukan pola serupa di Lampung, sektor industri pengolahan dan pertanian secara konsisten mendominasi FL dalam perekonomian provinsi berbasis sumber daya alam di Sumatera, memperkuat relevansi temuan untuk Riau.

Terdapat 6 sektor dengan FL normalisasi  $\geq 1$ : Industri Pengolahan (C), Pengadaan Listrik dan Gas (D), Pertanian/Kehutanan/Perikanan (A), Pertambangan dan Penggalian (B), Perdagangan Besar dan Eceran (G), dan Jasa Perusahaan (MN). Ramadani et al. , (2025) mengidentifikasi bahwa sektor Pertanian, Pertambangan, dan Industri Pengolahan merupakan tiga sektor basis utama Riau periode 2018–2022 dengan nilai LQ masing-masing 2,15; 2,23; dan 1,52, mengkonfirmasi bahwa ketiga sektor tersebut juga mendominasi keterkaitan ke depan sebagaimana ditunjukkan dalam analisis IO ini.

### ***Klasifikasi Sektor Berdasarkan Analisis Keterkaitan (Rasmussen, 1956)***

Berdasarkan kombinasi nilai BL dan FL normalisasi, setiap sektor dibagi ke dalam empat kuadran menggunakan metode Rasmussen. Cara ini telah menjadi standar dalam analisis ekonomi regional untuk menemukan sektor strategis (Miller & Blair, 2009).

**Tabel 7 Kriteria Klasifikasi Sektor Perekonomian Menurut Rasmussen (1956)**

<b>Klasifikasi Sektor</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
Sektor Kunci (Key Sector)	$BL \geq 1$ dan $FL \geq 1$	Keterkaitan kuat ke depan dan ke belakang; efek multiplier terbesar.
Berbasis Permintaan Akhir (Demand-Oriented)	$BL \geq 1$ dan $FL < 1$	Keterkaitan ke belakang kuat, ke depan lemah; bergantung permintaan akhir.
Berbasis Penawaran (Supply-Oriented)	$BL < 1$ dan $FL \geq 1$	Keterkaitan ke depan kuat, ke belakang lemah; pemasok input utama.
Sektor Lemah (Weak Sector)	$BL < 1$ dan $FL < 1$	Keterkaitan rendah ke depan dan ke belakang; efek multiplier terbatas.

*Sumber: (Miller & Blair, 2009)*

Hasil klasifikasi menunjukkan ada 2 (dua) Sektor Kunci: Industri Pengolahan (C) dengan BL normalisasi 1,2095 dan FL normalisasi 1,9247; serta Pengadaan Listrik dan Gas (D) dengan BL normalisasi 1,4535 dan FL normalisasi 1,4436. Kedua sektor ini memiliki efek pengganda terbesar karena dapat mendorong permintaan input dari sektor hulu serta memasok output ke sektor hilir. Ronalia, (2021) secara jelas merekomendasikan hilirisasi industri di Riau karena Industri Pengolahan sebagai sektor kunci dapat menarik dan mendukung pertumbuhan sektor lain dalam ekosistem perekonomian Riau.

Sebanyak 6 (enam) sektor Berbasis Permintaan Akhir (Demand-Oriented) ditemukan: Pengadaan Air/Sampah/Limbah (E), Konstruksi (F), Transportasi dan Pergudangan (H), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I), Administrasi Pemerintahan (O), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q). Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, sektor-sektor demand-oriented seperti konstruksi dan transportasi penting sebagai infrastruktur

pendukung investasi, sehingga perlu diprioritaskan dalam perencanaan tata ruang dan APBD daerah.

Empat sektor tergolong Berbasis Penawaran (Supply-Oriented): Pertanian (A), Pertambangan (B), Perdagangan Besar dan Eceran (G), dan Jasa Perusahaan (MN). Sektor Pertanian Riau terutama perkebunan kelapa sawit menjadi tulang punggung pemasok bahan baku industri pengolahan. Sitorus et al., (2025) menemukan bahwa sektor perkebunan dan industri pengolahan berbasis sawit secara prospektif akan tetap menjadi sektor strategis Riau, sehingga penguatan rantai pasokan dari hulu (pertanian) ke hilir (industri pengolahan) menjadi program pembangunan wilayah yang mendesak.

Lima sektor dikategorikan sebagai Sektor Lemah (Weak Sector): Informasi dan Komunikasi (J), Jasa Keuangan dan Asuransi (K), Real Estate (L), Jasa Pendidikan (P), dan Jasa Lainnya (RSTU). Meskipun memiliki keterkaitan relatif lemah saat ini, Sitorus et al., (2025) menemukan bahwa Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan teridentifikasi sebagai sektor prospektif di Riau dalam jangka panjang yang menunjukkan potensi peningkatan peran sektor-sektor ini seiring dengan transformasi struktural perekonomian.

#### **4.6 Implikasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil ketiga analisis tersebut, terdapat beberapa implikasi kebijakan strategis:

- Penguatan integrasi antar sektor harus dilakukan dengan mendorong hubungan hulu–hilir antara sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa agar tercipta sistem ekonomi wilayah yang saling mendukung dan berkelanjutan.
- Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan menjadi penting melalui pembentukan kawasan agroindustri atau kawasan ekonomi lokal yang dapat menghubungkan wilayah produksi dengan wilayah pengolahan dan distribusi secara efektif.
- Peningkatan konektivitas dan infrastruktur wilayah harus diprioritaskan untuk memperlancar arus barang dan jasa antar wilayah, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat integrasi ekonomi regional.
- Pemerataan pembangunan antar wilayah harus didorong melalui penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah hinterland agar tidak terjadi konsentrasi pembangunan pada wilayah tertentu dan untuk mengurangi ketimpangan regional.
- Penguatan peran sektor jasa diperlukan sebagai pendukung utama sistem ekonomi wilayah, terutama dalam distribusi, pembiayaan, dan penyediaan informasi pasar untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi daerah.
- Transformasi struktur ekonomi daerah perlu diarahkan secara bertahap dari ketergantungan pada sektor berbasis sumber daya alam menuju sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis sektoral terhadap perekonomian Provinsi Riau periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa perekonomian daerah masih bergantung pada sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan berperan sebagai sektor dasar ( $LQ > 1$ ). Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Riau masih bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam, meskipun telah menunjukkan arah menuju penguatan sektor industri.

Berdasarkan hasil analisis shift share sektor industri pengolahan mempunyai daya saing tertinggi dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, berdasarkan Tipologi Klassen, sektor pertanian tergolong sebagai sektor maju dan tumbuh cepat, sedangkan sektor industri pengolahan dan pertambangan termasuk sektor maju tetapi tertekan. Sebagian besar sektor jasa berada dalam kategori potensial berkembang, namun belum menjadi sektor utama.

Hasil analisis Input-Output, sektor industri pengolahan dan pengadaan listrik dan gas merupakan sektor kunci karena memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang tinggi. Sektor pertanian dan pertambangan berperan sebagai penyedia utama input (hulu), sedangkan sektor jasa dan infrastruktur berfungsi sebagai pendukung aktivitas hilir.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah memfokuskan kebijakan pada penguatan hilirisasi industri berbasis pertanian, peningkatan daya saing sektor industri, serta pengembangan sektor jasa sebagai pendukung utama sistem ekonomi. Selain itu, diperlukan peningkatan infrastruktur dan konektivitas guna memperkuat keterkaitan antar sektor sehingga tercipta struktur ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Ansofino. (2016). *PEMBANGUNAN KORIDOR EKONOMI SUMATERA BARAT SEBAGAI STRATEGI MEMPERKUAT KONEKTIFITAS DENGAN PEREKONOMIAN NEGARA ASEAN*. 4(2).
- Arsyad, L. (2010). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Pertama*. 11(1), 20–28.
- Asriadi, A., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). *Paradigma Ekonomi Berkelanjutan di Negara Berkembang Dalam Perspektif Islam*. 10(01), 1009–1016.
- Azizah, V., & Widiyanto, D. (2025). *Analisis hubungan tingkat perkembangan ketimpangan wilayah di Indonesia*. 20. <https://doi.org/10.20961/region.v20i1.86894>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2021). *Tabel Input-Output Provinsi Riau Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (17 Lapangan Usaha), 2016 (juta rupiah)*. <https://riau.bps.go.id/en/statistics-table/1/Mzc2IzE=/-tabel-input-output-provinsi-riau-transaksi-domestik-atas-dasar-harga-produsen--17-lapangan-usaha---2016--juta-rupiah-.html>
- Barika, Ekaputri, R. A., Septriani, & Efendi. (2021). *Analisis struktur ekonomi di sumatera*. 4.
- BPS Riau. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha 2020–2024*.
- Hayati, M., Elfiana, & Martina. (2017). *PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH*. 1(3), 213–222.
- Huda, N., Hanum, I., & Darma, C. (2025). *BACKWARD DAN FORWARD LINKAGE SEKTOR PERTANIAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA BARAT ( PENDEKATAN INPUT OUTPUT )*. 3(1), 24–37.
- Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input–Output Analysis Foundations and Extensions*. United States of America by Cambridge University Press.
- Oktaliando, R., Hudoyo, A., & Soelaiman, A. (2013). Analisis keterkaitan sektor agroindustri terhadap perekonomian di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science*, 1(1).
- Robinson Tarigan, M. R. P. (2018). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Bumi

Aksara.

- Ronalia, P. (2021). *Potensi Hilirisasi Industri di Provinsi Riau (Perspektif Tabel Interregional Input Output)*. 1(3), 182–197. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.03.06>
- Sitorus, Y. F., Setiawan, D. R., & Basmallah, F. D. (2025). *Identifikasi Sektor Ekonomi Unggulan Pada Provinsi Riau*. 5(1), 94–118.
- Situmeang, R. (2023). Sektor Basis dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Riau. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.
- Sjafrizal, E. (2008). *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi*. Padang Sumatera Barat, Pandang.
- Suryani, T. (2013). ANALISIS PERAN SEKTOR EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PEMALANG (ANALISIS TABEL INPUT OUTPUT KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010). *Economics Development Analysis Journal*, 2(1).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009). *Economic development*. Pearson education.
- Tutupoho, A. (2019). *ANALISIS SEKTOR BASIS DAN SEKTOR NON BASIS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI MALUKU ( STUDI KASUS KABUPATEN KOTA )*. XIII(1).